

Transformasi Industri Asuransi Syariah Pasca Kebijakan Spin-Off: Analisis Kesiapan dan Tantangan di Aceh

Maisarah Muhammad Thaib

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email : 94maisarah@gmail.com

ABSTRACT

The *spin-off* policy in the Islamic insurance industry represents an institutional strengthening strategy intended to enhance the independence and sustainability of Islamic insurance businesses in Indonesia. In Aceh, this policy has particular relevance because the region possesses distinctive social and institutional characteristics associated with the implementation of Sharia principles. This study aims to analyze the readiness of the Islamic insurance industry and identify the challenges arising after the implementation of the *spin-off* policy in Aceh. The study employs a library research method by examining relevant written sources, including books, scholarly articles, regulations, institutional reports, and publications concerning the development of the Islamic insurance industry. The data are analyzed descriptively and analytically through identification, classification, comparison, and synthesis of information related to industry readiness and post-*spin-off* challenges. The findings indicate that readiness for transformation is influenced by institutional strength, capital adequacy, human resource capacity, governance quality, technological preparedness, adaptive capability, and market development. Meanwhile, the main challenges involve public literacy and trust, market penetration, operational efficiency, consistent Sharia compliance, and business sustainability. The study concludes that *spin-off* should not merely be understood as an administrative separation, but as a comprehensive transformation integrating internal corporate readiness with Aceh's socioeconomic characteristics. This study contributes a contextual perspective on Islamic insurance transformation at the regional level and offers a conceptual basis for developing more adaptive, competitive, and sustainable institutional strategies.

Keywords: *Spin-Off*, Islamic Insurance, Aceh

ABSTRAK

Kebijakan *spin-off* dalam industri asuransi syariah merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kemandirian usaha syariah di Indonesia. Dalam konteks Aceh, kebijakan tersebut memiliki relevansi khusus karena daerah ini memiliki karakteristik sosial dan kelembagaan yang kuat dalam penerapan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan industri asuransi syariah serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pasca kebijakan *spin-off* di

Aceh. Penelitian menggunakan metode *library research* dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi buku, artikel ilmiah, regulasi, laporan kelembagaan, dan publikasi terkait perkembangan industri asuransi syariah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses identifikasi, pengelompokan, perbandingan, dan sintesis terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan kesiapan dan tantangan industri. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesiapan pasca-*spin-off* ditentukan oleh kekuatan kelembagaan, kecukupan permodalan, kapasitas sumber daya manusia, kualitas tata kelola, kesiapan teknologi, kemampuan adaptasi, serta pengembangan pasar. Di sisi lain, tantangan utama mencakup literasi dan kepercayaan masyarakat, penetrasi pasar, efisiensi operasional, konsistensi kepatuhan syariah, dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *spin-off* tidak cukup dipahami sebagai pemisahan administratif, tetapi perlu ditempatkan sebagai transformasi menyeluruh yang mengintegrasikan kesiapan internal perusahaan dengan karakteristik sosial-ekonomi Aceh. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif kontekstual mengenai transformasi industri asuransi syariah pada tingkat daerah serta penguatan strategi kelembagaan yang lebih adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Spin-Off*, Asuransi Syariah, Aceh

PENDAHULUAN

Asuransi syariah merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang hadir untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaannya menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam memperoleh perlindungan keuangan yang selaras dengan nilai keadilan, kebersamaan, dan saling menolong. Dalam praktiknya, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang mendukung stabilitas keuangan masyarakat. Perkembangan kebutuhan terhadap perlindungan risiko turut mendorong industri asuransi syariah untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menempatkan asuransi syariah sebagai salah satu sektor yang memerlukan penguatan secara berkelanjutan (Fitroti et al., 2025).

Perkembangan industri asuransi syariah tidak hanya bergantung pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk perlindungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberlanjutan industri ini juga ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam membangun tata kelola, pengelolaan risiko, pelayanan, dan struktur kelembagaan yang kuat (Dwianasari et al., 2025). Semakin kompleks kebutuhan masyarakat, semakin besar pula tuntutan terhadap perusahaan asuransi syariah untuk menyediakan layanan yang profesional dan dapat dipercaya. Kondisi tersebut menuntut adanya peningkatan kapasitas perusahaan agar mampu menghadapi persaingan sekaligus mempertahankan

karakteristik syariahnya. Dengan demikian, penguatan industri asuransi syariah perlu dilakukan tidak hanya dari sisi produk dan pemasaran, tetapi juga dari sisi kelembagaan.

Penguatan kelembagaan menjadi bagian penting dalam mendorong kemandirian dan daya saing industri asuransi syariah di Indonesia. Struktur kelembagaan yang kuat memberikan ruang yang lebih luas bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi bisnis, meningkatkan kualitas pengelolaan, serta memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian kelembagaan juga memungkinkan pengelolaan kegiatan usaha syariah dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan industrinya (Firdausy, 2021). Dalam konteks tersebut, pengembangan asuransi syariah tidak lagi cukup ditempatkan sebagai bagian tambahan dari kegiatan usaha perusahaan konvensional. Diperlukan suatu bentuk kelembagaan yang mampu memberikan posisi lebih mandiri bagi kegiatan usaha asuransi syariah.

Salah satu bentuk penguatan kelembagaan tersebut diwujudkan melalui kebijakan pemisahan atau *spin-off* unit usaha syariah dari perusahaan asuransi induknya. Proses *spin-off* membawa perubahan penting karena unit usaha syariah diarahkan untuk memiliki kelembagaan dan pengelolaan usaha yang lebih mandiri. Perubahan tersebut membuka peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan produk, sumber daya, tata kelola, dan strategi bisnis yang lebih berorientasi pada kebutuhan pasar asuransi syariah. Namun, proses pemisahan juga menuntut kesiapan yang memadai dalam aspek permodalan, sumber daya manusia, infrastruktur, manajemen, dan keberlanjutan usaha (Nasution, 2019a). Oleh karena itu, implementasi kebijakan *spin-off* dapat menghadirkan peluang penguatan industri sekaligus berbagai tantangan yang perlu dihadapi oleh pelaku asuransi syariah.

Persoalan kesiapan dan tantangan pasca kebijakan *spin-off* menjadi semakin menarik untuk dikaji dalam konteks Aceh. Daerah ini memiliki karakteristik tersendiri dalam penerapan prinsip syariah pada kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perkembangan industri keuangan syariah memiliki ruang yang penting dalam aktivitas ekonominya. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi industri asuransi syariah untuk memperkuat keberadaan dan memperluas pelayanan kepada masyarakat (Farma & Umuri, 2024). Meskipun demikian, peluang tersebut tetap berkaitan dengan kesiapan perusahaan dalam menghadapi perubahan kelembagaan, kebutuhan pasar, sumber daya manusia, serta kemampuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan asuransi syariah. Atas dasar itu, analisis terhadap kesiapan dan tantangan industri asuransi syariah pasca kebijakan *spin-off* di Aceh menjadi penting untuk dilakukan.

Meskipun kebijakan *spin-off* diarahkan untuk memperkuat kemandirian kelembagaan asuransi syariah, kesiapan industri dalam menjalani proses transformasi tersebut belum sepenuhnya dapat dipahami dalam konteks daerah. Pembahasan mengenai *spin-off* selama ini lebih mudah ditempatkan dalam kerangka perubahan struktur kelembagaan perusahaan, sementara kondisi yang muncul pada tingkat daerah dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Aceh memiliki lingkungan sosial, ekonomi, dan penerapan prinsip syariah yang menjadikan respons terhadap transformasi industri asuransi syariah tidak selalu dapat disamakan dengan daerah lain. Karena itu, masih terdapat ruang kajian mengenai sejauh mana industri asuransi syariah memiliki kesiapan untuk menghadapi perubahan kelembagaan pasca-*spin-off* dalam konteks Aceh.

Kesenjangan berikutnya berkaitan dengan belum terpetakannya secara utuh berbagai dimensi kesiapan yang menentukan keberhasilan transformasi industri asuransi syariah di Aceh. Kesiapan tersebut tidak hanya menyangkut kemampuan perusahaan memenuhi tuntutan kelembagaan, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, tata kelola, infrastruktur pelayanan, pengembangan produk, serta kemampuan beradaptasi dengan karakteristik pasar lokal. Masing-masing aspek tersebut dapat saling memengaruhi dan menentukan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keberlanjutan usaha setelah pemisahan. Namun, keterkaitan antara kesiapan internal perusahaan dan karakteristik lingkungan asuransi syariah di Aceh masih memerlukan penjelasan yang lebih komprehensif. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian yang menempatkan kesiapan *spin-off* sebagai persoalan multidimensional, bukan semata-mata perubahan status kelembagaan.

Selain persoalan kesiapan, tantangan yang muncul setelah *spin-off* juga belum sepenuhnya teridentifikasi dalam konteks perkembangan industri asuransi syariah di Aceh. Kemandirian perusahaan tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan daya saing apabila tidak didukung oleh pasar yang memadai, kepercayaan masyarakat, kualitas pelayanan, serta kemampuan perusahaan mempertahankan keberlanjutan usahanya. Di sisi lain, karakteristik Aceh sebagai daerah yang memiliki ruang penerapan syariah yang kuat dapat menjadi peluang sekaligus menghadirkan tuntutan yang lebih besar terhadap kesesuaian praktik asuransi dengan prinsip syariah. Belum jelas bagaimana peluang dan berbagai tantangan tersebut berinteraksi setelah berlangsungnya transformasi kelembagaan melalui *spin-off*. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting untuk menganalisis kesiapan dan tantangan transformasi industri asuransi syariah pasca kebijakan *spin-off* di Aceh.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan perhatian terhadap perkembangan kebijakan *spin-off* dalam industri asuransi syariah melalui berbagai perspektif. Kajian yang telah dilakukan umumnya membahas aspek regulasi, kinerja perusahaan, tata kelola, permodalan, serta penguatan kelembagaan setelah pemisahan unit usaha syariah. Berbagai penelitian tersebut telah memberikan landasan penting untuk memahami *spin-off* sebagai bagian dari proses penguatan dan kemandirian industri asuransi syariah. Namun, pembahasan yang secara bersamaan menghubungkan kesiapan industri, tantangan pasca-*spin-off*, dan karakteristik penerapan syariah pada tingkat daerah masih belum memperoleh perhatian yang memadai. Terlebih lagi, konteks Aceh memiliki karakteristik tersendiri yang memungkinkan proses transformasi industri asuransi syariah berlangsung dalam lingkungan yang berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya (Cahyadi et al., 2023).

Kesenjangan tersebut penting untuk diisi karena keberhasilan *spin-off* tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya ketentuan pemisahan secara kelembagaan, tetapi juga oleh kemampuan industri untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya setelah menjadi lebih mandiri. Kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, permodalan, infrastruktur pelayanan, kemampuan adaptasi, serta kondisi pasar merupakan bagian yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan transformasi tersebut. Dalam konteks Aceh, aspek-aspek tersebut perlu dilihat bersamaan dengan karakteristik masyarakat dan lingkungan penerapan prinsip syariah yang dapat menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi industri. Pengkajian secara kontekstual diperlukan agar transformasi pasca-*spin-off* tidak hanya dipahami sebagai perubahan struktur perusahaan, tetapi juga sebagai proses penyesuaian industri terhadap kebutuhan dan karakteristik daerah. Dengan demikian, pengisian kesenjangan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai kondisi aktual transformasi industri asuransi syariah di Aceh.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis tingkat kesiapan industri asuransi syariah dalam menghadapi transformasi pasca kebijakan *spin-off* di Aceh. Analisis dilakukan dengan memperhatikan dimensi kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, kemampuan adaptasi, kondisi pasar, dan berbagai faktor yang dapat memengaruhi keberlanjutan industri. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam proses transformasi serta menjelaskan keterkaitannya dengan karakteristik lingkungan ekonomi dan penerapan prinsip syariah di Aceh. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu mengisi ruang yang belum banyak dijelaskan oleh penelitian sebelumnya sekaligus memberikan dasar bagi perumusan strategi penguatan industri asuransi syariah pasca-*spin-off* yang lebih sesuai dengan kondisi Aceh.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. *Library research* merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian (Walidin et al., 2015; Zed, 2004). Sumber tersebut dapat berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan industri asuransi syariah dan kebijakan *spin-off*. Metode ini dipilih karena kajian difokuskan pada pemahaman konseptual, regulatif, dan perkembangan industri berdasarkan sumber-sumber tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur yang membahas perkembangan asuransi syariah, kebijakan pemisahan unit usaha syariah, kesiapan kelembagaan, tata kelola, sumber daya manusia, permodalan, serta tantangan industri pasca-*spin-off*. Selain itu, kajian juga diarahkan pada sumber yang berkaitan dengan karakteristik penerapan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh. Data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, keterbaruan, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kesiapan dan tantangan transformasi industri asuransi syariah di Aceh.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, dan menafsirkan berbagai informasi yang ditemukan dalam literatur. Analisis diarahkan untuk melihat hubungan antara kebijakan *spin-off* dengan kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya, kondisi pasar, dan tantangan keberlanjutan industri asuransi syariah di Aceh. Hasil kajian dari berbagai sumber kemudian disintesis untuk menemukan pola, kecenderungan, serta persoalan yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi industri asuransi syariah pasca kebijakan *spin-off* dalam konteks Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *spin-off* membawa perubahan mendasar terhadap arah pengembangan industri asuransi syariah. Pemisahan unit usaha syariah dari perusahaan induk mendorong terbentuknya pengelolaan yang lebih mandiri, baik dalam aspek kelembagaan maupun dalam penyusunan strategi bisnis. Kemandirian tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi perusahaan untuk menentukan orientasi pengembangan produk dan layanan sesuai dengan karakteristik pasar syariah (Rahmi & Siswantini, 2025). Namun, proses transformasi ini juga menuntut kesiapan yang lebih tinggi karena perusahaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dukungan struktur perusahaan induknya. Dengan

demikian, *spin-off* menjadi titik penting yang mengubah posisi unit usaha syariah dari bagian pelengkap menjadi entitas yang dituntut mampu berdiri dan berkembang secara mandiri.

Kesiapan kelembagaan menjadi salah satu unsur utama dalam menentukan keberhasilan transformasi pasca-*spin-off*. Kelembagaan yang mandiri memerlukan struktur organisasi yang jelas, pembagian kewenangan yang efektif, serta mekanisme pengambilan keputusan yang mampu mendukung karakteristik bisnis syariah. Perusahaan juga perlu memiliki sistem pengawasan internal yang dapat memastikan aktivitas usaha berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Kesiapan pada aspek ini menjadi penting karena perubahan status kelembagaan dapat menimbulkan penyesuaian dalam pola kerja, pengelolaan, dan hubungan antarbagian perusahaan (Purnomo, 2023). Oleh karena itu, kekuatan struktur kelembagaan menjadi fondasi bagi keberlanjutan perusahaan asuransi syariah setelah proses pemisahan dilakukan.

Selain aspek kelembagaan, hasil kajian menunjukkan bahwa permodalan merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kesiapan menghadapi *spin-off*. Kemandirian perusahaan membutuhkan kemampuan finansial yang cukup untuk menjalankan operasional, mengembangkan produk, memperkuat teknologi, dan memperluas jaringan pelayanan. Kebutuhan tersebut dapat menjadi tantangan bagi perusahaan yang sebelumnya masih memperoleh dukungan sumber daya dari perusahaan induk. Kondisi permodalan yang terbatas berpotensi menghambat kemampuan perusahaan untuk bersaing dan melakukan ekspansi setelah menjadi entitas yang berdiri sendiri (Suryawadi, 2025). Dengan demikian, kesiapan finansial menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kemampuan industri menjalani transformasi secara berkelanjutan.

Sumber daya manusia memiliki posisi strategis dalam proses transformasi industri asuransi syariah. Kemandirian kelembagaan membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya memahami industri perasuransian, tetapi juga memiliki pengetahuan mengenai prinsip dan mekanisme keuangan syariah (Haerunnisa & Rakhman, 2025). Kebutuhan tersebut mencakup kemampuan dalam pengembangan produk, pengelolaan risiko, pemasaran, pengelolaan dana, pelayanan peserta, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kekurangan tenaga profesional yang memiliki kompetensi ganda dapat memperlambat proses adaptasi perusahaan setelah *spin-off*. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dari kesiapan transformasi industri asuransi syariah.

Aspek tata kelola juga ditemukan sebagai faktor yang sangat menentukan kualitas transformasi pasca-*spin-off*. Perusahaan asuransi syariah membutuhkan tata kelola yang mampu mengintegrasikan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitas

perusahaan. Tata kelola yang baik diperlukan untuk menjaga hubungan kepercayaan antara perusahaan dan peserta asuransi, terutama dalam pengelolaan dana yang memiliki karakteristik berbeda dari asuransi konvensional. Kemandirian perusahaan tanpa tata kelola yang kuat justru dapat meningkatkan risiko operasional dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat. Karena itu, proses *spin-off* perlu diiringi dengan penguatan sistem tata kelola yang sesuai dengan karakteristik industri asuransi syariah.

Kesiapan infrastruktur dan teknologi pelayanan menjadi kebutuhan yang semakin penting dalam mendukung kemandirian perusahaan. Setelah *spin-off*, perusahaan dituntut memiliki sistem operasional yang mampu menunjang pelayanan secara mandiri, mulai dari pengelolaan data peserta hingga penyelesaian klaim. Pemanfaatan teknologi juga berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk asuransi syariah, terutama pada wilayah yang belum memiliki jaringan layanan fisik yang luas. Dalam konteks Aceh, pemanfaatan layanan digital dapat menjadi salah satu jalan untuk menjangkau masyarakat di berbagai kabupaten dan kota (Press, 2020). Oleh karena itu, kesiapan teknologi perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi penguatan perusahaan pasca-*spin-off*.

Dalam konteks Aceh, hasil kajian menunjukkan adanya peluang yang cukup besar bagi perkembangan industri asuransi syariah. Lingkungan sosial dan kelembagaan yang memberi ruang besar terhadap penerapan prinsip syariah dapat menjadi modal penting dalam memperluas penerimaan masyarakat terhadap produk asuransi syariah. Karakteristik tersebut memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengembangkan produk perlindungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal. Meskipun demikian, keberadaan lingkungan yang mendukung prinsip syariah tidak secara otomatis menyebabkan masyarakat memilih atau menggunakan produk asuransi syariah. Peluang tersebut tetap perlu diikuti dengan strategi pelayanan, edukasi, dan pengembangan produk yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Aceh (Yusuf, 2023).

Tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat menjadi tantangan penting dalam pengembangan industri asuransi syariah di Aceh. Kesesuaian suatu produk dengan prinsip syariah belum tentu cukup untuk mendorong masyarakat menjadi peserta apabila manfaat, mekanisme, dan hak serta kewajiban dalam asuransi belum dipahami dengan baik. Kepercayaan masyarakat sangat berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana, kemudahan memperoleh layanan, kejelasan prosedur klaim, serta konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi menjadi kebutuhan strategis setelah perusahaan menjalani proses *spin-off*. Literasi yang baik dapat membantu masyarakat membedakan karakteristik asuransi syariah sekaligus

meningkatkan pemahaman mengenai manfaat perlindungan risiko (Panorama & Bayumi, 2024).

Selain persoalan literasi, penetrasi pasar juga menjadi tantangan dalam memperkuat industri asuransi syariah pasca-*spin-off*. Perusahaan perlu memperluas basis peserta agar kemandirian kelembagaan diikuti dengan keberlanjutan usaha secara ekonomi. Dalam konteks Aceh, perluasan pasar dapat diarahkan tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada pelaku usaha, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, komunitas, dan berbagai sektor ekonomi yang membutuhkan perlindungan risiko. Pengembangan pasar tersebut memerlukan produk yang sesuai dengan kemampuan ekonomi serta kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, keberhasilan *spin-off* tidak hanya bergantung pada perubahan struktur perusahaan, tetapi juga pada kemampuan menciptakan pasar yang cukup kuat untuk menopang kelangsungan usaha.

Tantangan pasca-*spin-off* juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan menjaga efisiensi operasional dan daya saing. Ketika unit usaha telah berdiri sebagai perusahaan yang mandiri, berbagai biaya yang sebelumnya dapat ditanggung bersama dengan perusahaan induk harus dikelola secara lebih independen. Kondisi ini menuntut strategi bisnis yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan penguatan organisasi dan kemampuan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, perusahaan juga perlu menghadirkan layanan yang kompetitif tanpa mengurangi karakteristik dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Nasution, 2019b). Oleh karena itu, kemampuan mengelola efisiensi sekaligus menjaga kualitas pelayanan merupakan salah satu tantangan nyata dalam transformasi industri.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi industri asuransi syariah pasca kebijakan *spin-off* di Aceh ditentukan oleh keterhubungan antara kesiapan internal perusahaan dan kondisi eksternal lingkungan usaha. Kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, tata kelola, dan teknologi merupakan faktor internal yang perlu dipersiapkan secara terintegrasi, sedangkan literasi masyarakat, kepercayaan, karakteristik pasar, dan lingkungan syariah menjadi faktor eksternal yang turut menentukan keberlanjutan industri. Berdasarkan analisis penulis, *spin-off* tidak seharusnya dipahami hanya sebagai kewajiban pemisahan administratif, tetapi perlu ditempatkan sebagai momentum untuk melakukan transformasi menyeluruh terhadap model bisnis asuransi syariah. Dalam konteks Aceh, transformasi tersebut perlu diarahkan pada pembentukan industri yang mampu menggabungkan kemandirian kelembagaan, profesionalitas pengelolaan, kepatuhan syariah, dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan *spin-off* berpotensi menjadi instrumen penguatan industri asuransi syariah yang lebih adaptif, kompetitif, terpercaya, dan berkelanjutan.

PENUTUP

Transformasi industri asuransi syariah pasca kebijakan *spin-off* di Aceh sangat ditentukan oleh kesiapan perusahaan dalam membangun kemandirian kelembagaan sekaligus menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Kesiapan tersebut mencakup aspek permodalan, sumber daya manusia, tata kelola, teknologi pelayanan, kemampuan adaptasi, dan pengembangan pasar. Dalam konteks Aceh, karakteristik penerapan prinsip syariah memberikan peluang strategis bagi pengembangan industri asuransi syariah, tetapi peluang tersebut belum secara otomatis menjamin keberhasilan transformasi pasca-*spin-off*. Oleh karena itu, keberhasilan *spin-off* memerlukan kesiapan yang terintegrasi antara kapasitas internal perusahaan dan kemampuan merespons karakteristik lingkungan ekonomi serta kebutuhan masyarakat Aceh.

Temuan penelitian juga menegaskan bahwa tantangan pasca-*spin-off* tidak terbatas pada kemampuan perusahaan untuk berdiri secara kelembagaan, tetapi mencakup kemampuan mempertahankan keberlanjutan dan daya saing usaha. Penguatan literasi, peningkatan kepercayaan masyarakat, perluasan penetrasi pasar, efisiensi operasional, dan konsistensi penerapan prinsip syariah menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian. Kemandirian perusahaan akan lebih bermakna apabila diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan serta kemampuan menghadirkan produk perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, *spin-off* perlu ditempatkan sebagai proses transformasi menyeluruh yang menghubungkan penguatan kelembagaan dengan pengembangan ekosistem asuransi syariah yang berkelanjutan di Aceh.

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa kerangka pemahaman yang menempatkan kesiapan dan tantangan *spin-off* asuransi syariah dalam konteks kekhasan daerah Aceh. Kajian ini memperluas pembahasan *spin-off* dari persoalan regulasi dan perubahan struktur kelembagaan menuju keterkaitan antara kapasitas perusahaan, karakteristik pasar, kepercayaan masyarakat, dan lingkungan penerapan syariah. Secara akademik, temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi pengembangan kajian lebih lanjut mengenai transformasi kelembagaan industri keuangan syariah pada tingkat daerah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku industri dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi penguatan asuransi syariah pasca-*spin-off* yang lebih adaptif terhadap karakteristik dan kebutuhan masyarakat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, A., Amalia, E., & Amilin, A. (2023). Evaluasi Kebijakan Spin Off Pada Industri Asuransi Syariah Di Indonesia. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(1), 121–136.
- Dwianasari, F., Saputra, H. A., Mujaliza, N., Natasya, S., & Marcelino, W. (2025). Kajian Literatur Tentang Efektivitas Asuransi Syariah Sebagai Alternatif Konvensional Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 3(2), 235–242.
- Farma, J., & Umuri, K. (2024). Lembaga keuangan syariah di Aceh: Tantangan dan peluang. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 16(2), 137–153.
- Firdausy, C. M. (2021). *Memajukan Industri Keuangan Syariah Berdaya Saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fitroti, A., Husniyyah, N., Chandra, R. A., Setiawan, I., & Widiyanti, N. (2025). *Asuransi Syariah Sebagai Instrumen Perlindungan Keuangan Yang Berkeadilan: Studi Kepustakaan*. 56, 1516–1522.
- Haerunnisa, N., & Rakhman, S. (2025). Analisis Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Daya Saing Pada Industri Pialang Asuransi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia*, 3(2), 226–242.
- Nasution, L. Z. (2019a). Strategi Spin-Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 2(2), 80–93.
- Nasution, L. Z. (2019b). Strategi Spin-Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah. *JDEP (Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan)*, 2(2), 80–93.
- Panorama, M., & Bayumi, M. R. (2024). *Pengembangan Model Institusi Keuangan Nonbank Syariah*. Penerbit NEM.
- Press, U. (2020). *Pengalaman Melembagakan Inovasi*. UGM PRESS.
- Purnomo, H. (2023). Manajemen Strategik Bank: Strategi Bisnis Bank Syariah Pasca Spin-Off dan Konversi. *Penerbit Literasi Nusantara*. Malang.
- Rahmi, M., & Siswantini, T. (2025). Spin Off Asuransi Syariah Di Indonesia: Kajian Efisiensi Dan Kinerja Keuangan. *Islamic Economics and Business Review*, 4(1), 116–124.
- Suryawadi, E. (2025). Analisis Persiapan Spin-Off Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Umum Dalam Perspektif Regulasi UU PPSK No. 4 Tahun 2023 Dan POJK No. 11 Tahun 2023. *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, 8(2), 119–135.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani, Z. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. FTK Ar-Raniry Press.

- Yusuf, M. Y. (2023). *INOVASI PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN: Kajian Kebijakan Pembiayaan Syariah Pasca Lahirnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 di Aceh*. Ar-Raniry Press.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.